
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat

Cindriyanti¹, Susy Hambani², Saepul Anwar³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda
Corresponding author: cindriyanti24@gmail.com

ABSTRACT

Purpose. *This research aims to determine the influence of Economic Growth, Regional Original Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund on Capital Expenditure in West Java Province during 2018-2022.*

Methods. *The methods used is quantitative with secondary data obtained from the Audit Board (BPK) and the Central Statistics Agency (BPS). Sampling through saturated sampling techniques and data processed using Eviews 12.*

Findings. *Research shows that Economic Growth, Local Original Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund simultaneously affect Capital Expenditure. Partially, Economic Growth and General Allocation Fund have a positive effect on Capital Expenditure. Meanwhile, Local Original Revenue and Special Allocation Fund have no effect on Capital Expenditure.*

Implication. *The results of this study are expected to help policy makers in determining effective budget allocations to improve community welfare and development in the regions.*

Keywords. *Economic Growth, Local Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.*

ABSTRAK

Tujuan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018-2022.

Metode. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengambilan sampel melalui teknik sampling jenuh dan data diolah menggunakan Eviews 12.

Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. secara parsial, pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. sedangkan, pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Implikasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam menentukan alokasi anggaran yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah.

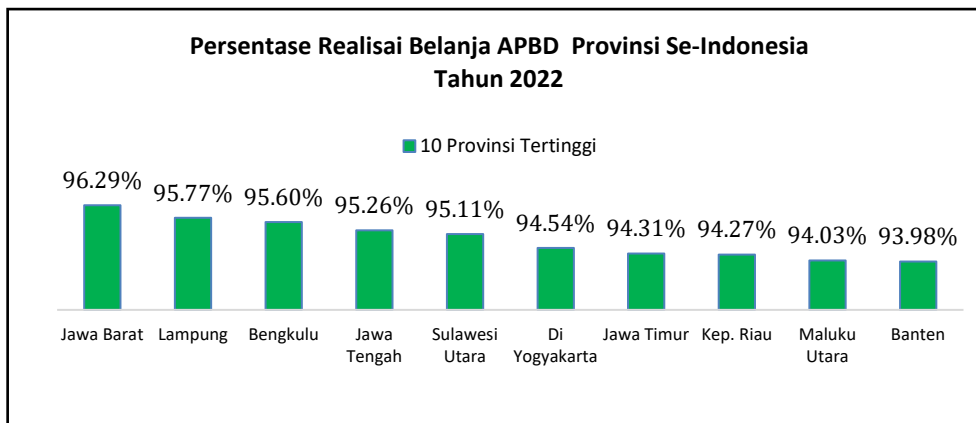
Kata Kunci. Pertumbuhan Ekonomi; Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Belanja Modal.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah atau Desentralisasi memberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal suatu daerah. Dari adanya otonomi daerah, terdapat indikator yang menjadi penilaian kemampuan suatu daerah dalam mengelola rumah tangga daerah yaitu keuangan daerah (Wahyuningsih, Afif & Hambani, 2023). Keuangan daerah tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan daerah (Khusaini, 2018).

Pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud otonomi daerah disebut dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yaitu ketika pemerintahan pusat memberikan kebebasan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Hal ini didukung oleh keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (Anwar, Lasmanal, et al., 2023). Karena adanya pembagian kekuasaan, penyelenggaraan negara dibiayai dari APBD sesuai dengan prinsip desentralisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi agenda pendapatan belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan jangka satu tahun anggaran (Khusaini, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2006, belanja modal mencakup seluruh pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal, termasuk pembelian tanah, peralatan, gedung, dan infrastruktur lainnya. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan persentase realisasi Belanja APBD Provinsi tertinggi di Indonesia yang disajikan pada Gambar sebagai berikut:

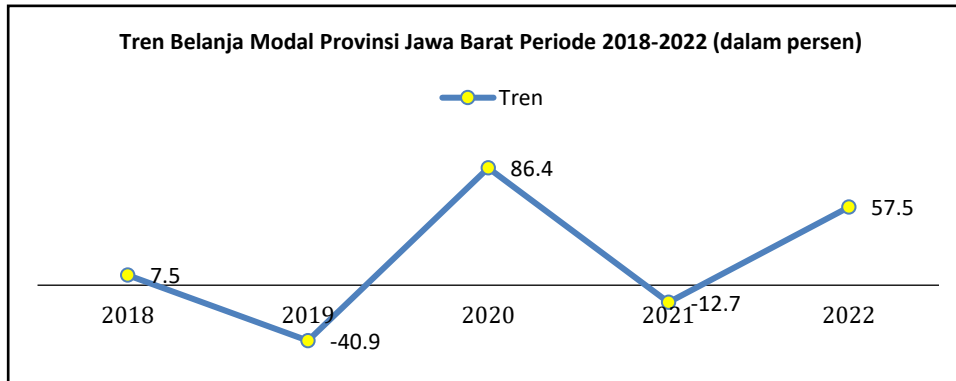


Sumber: Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, 2023

Gambar 1. Grafik Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi di Indonesia (Per 22 Desember 2022)

Berdasarkan Gambar 1 persentase realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat memiliki nilai tertinggi sebesar 96,29%. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah Provinsi Jawa Barat jauh berbanding dengan provinsi lainnya. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2022, pemerintah pusat mewajibkan modal belanja minimal 30% dari seluruh belanja daerah akan dianggarkan untuk APBD per tahun. Persentase belanja modal pada tahun 2018-2022 dilihat menggunakan rasio belanja modal secara berturut-turut sebesar 18,49%, 17,20%, 15,85% 15,05% dan 14,78%, nilai tersebut berada dibawah 30% dari total belanja APBD. Sehingga, hal ini menjadi perhatian khusus terutama rendahnya belanja modal Provinsi Jawa Barat, atas dasar bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan Realisasi Belanja Daerah tertinggi pada tahun 2022.

Tren belanja modal umumnya positif dan kecenderungan meningkat (Mahmudi, 2009). Tren belanja modal Jawa Barat 2018-2022 bisa dilihat pada Gambar sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Gambar 2. Grafik Trend Belanja Modal Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2022

Berdasarkan Gambar 2 Trend belanja modal Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2022. Dimana pada tahun 2018, belanja modal mencapai Rp 2,86 triliun, meningkat 7,5% dari tahun sebelumnya. Ditahun 2019, belanja modal menurun menjadi Rp 1,69 triliun, turun 40,9% dari tahun sebelumnya, penurunan belanja modal disebabkan oleh penurunan pendapatan daerah akibat perlambatan ekonomi nasional dan global. Pada tahun 2020, belanja modal kembali meningkat menjadi Rp 3,15 triliun, naik 86,4% dari tahun sebelumnya, peningkatan belanja modal didorong oleh program peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pada tahun 2021, belanja modal menurun lagi menjadi Rp 2,75 triliun, turun 12,7% dari tahun sebelumnya, penurunan belanja modal disebabkan oleh kendala dalam pelaksanaan kegiatan belanja modal akibat pandemi Covid-19, seperti pembatasan mobilitas, keterlambatan pengadaan barang dan jasa, dan protokol kesehatan. Belanja modal meningkat tajam menjadi Rp 4,33 triliun pada tahun 2022, naik 57,5% dari tahun sebelumnya, peningkatan belanja modal didorong oleh stimulus fiskal, bantuan sosial, dan vaksinasi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sosial. Berdasarkan Tren Belanja Modal diatas menunjukkan bahwa Belanja Modal Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi tahun 2018-2022, dengan tahun 2019 dan 2021 sebagai tahun terendah dan tahun 2020 dan 2022 sebagai tahun tertinggi.

Peningkatan belanja modal menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan infrastruktur publik yang lebih baik (Mariani et al., 2023). Pemerintah daerah mengucurkan dana dari PAD, DAU serta DAK akan meningkatkan layanan masyarakat, serta meningkatkan belanja modal. Belanja modal diperkirakan menjadi meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi yang kuat dan pendapatan daerah yang meningkat (Adyatama, E., & Oktaviani, 2015).

Beberapa penelitian sebelumnya oleh Syukri & Hinaya (2019), variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sebaliknya, Lestari, dan Basuki (2024), berpendapat bahwa belanja modal tidak terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal oleh Sulistyarningsih & Haryanto (2019), Sedangkan, Novianti dan Rahayu, (2021) berpendapat bahwa pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi belanja modal. Selain itu, penelitian Alpi (2022), variabel dana alokasi khusus menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu, Twinki & Widiyanti (2023) menunjukkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya ditemukan perbedaan yang menunjukkan adanya inkonsistensi dalam literatur mengenai pengaruh terhadap belanja modal. Selain itu, berdasarkan fenomena yang dilatarbelakangi dari data trend belanja modal di Jawa Barat menunjukkan potensi fluktuasi. Adanya perbedaan dalam penelitian tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian ulang menggunakan topik sejenis, tetapi dengan variabel, obyek, jumlah subjek, metode pengambilan sampel, serta alat analisis yang digunakan berbeda.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Dengan mengacu pada teori agensi, yang menjelaskan peran dan tanggung jawab pemerintah pada pengelolaan anggaran serta belanja modal akan berpengaruh terhadap infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, teori federalisme fiskal digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah daerah dan lokal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah masing-masing.

2. Kajian Pustaka dan Hipotesis

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (dikenal juga dengan *Agency Theory*) sebuah teori dikemukakan oleh Jensen serta Meckling tahun 1976. Teori keagenan, mendefinisikan suatu keterkaitan kontraktual di dua entitas: agen serta prinsipal. Prinsipal memberikan agen hak untuk memutuskan sesuatu mengatasnamakan prinsipal (Jensen & Meckling, 2019). Teori ini secara khusus menggambarkan hubungan yang timbul dari pemerintah (agen) serta masyarakat (prinsipal), dimana prinsipal adalah pihak yang mengarahkan agen dalam melaksanakan semua pekerjaan memakai nama prinsipal (Sutisna, et al., 2024).

Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*)

Teori federalisme fiskal dikemukakan oleh Oates pada tahun 1972. Teori tersebut menekankan bahwa desentralisasi adalah strategi yang layak untuk mencapai kemajuan ekonomi. Teori ini menunjukkan bahwa dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya proses yang dikenal sebagai otonomi daerah dapat terjadi peningkatan dalam ekonomi, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat (Setiawan et al., 2022). Menurut Wasylenko (1987) meyakini bahwa pemerintah kota biasanya lebih efektif untuk mempersiapkan komoditas dan fasilitas umum, desentralisasi fiskal dapat memajukan perkembangan ekonomi serta menaikkan kesejahteraan (Aziz et al., 2023).

Belanja Modal

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Belanja Modal merupakan komponen dari pendapatan daerah yang digunakan dalam pembelian atau pembangun aktiva tetap seperti tanah, peralatan, gedung, jalan, dan infrastruktur lainnya dengan masa manfaat lebih dari setahun. Belanja ini dianggarkan pada APBD dengan berkontribusi pada peningkatan layanan publik karena aset yang dibeli atau dibangun memberikan manfaat jangka panjang (Nurbaeti et al., 2023). Belanja Modal bukan hanya penting dalam peningkatan prasarana akan tetapi esensial dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Belanja modal memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena memberikan manfaat jangka panjang (Alpi & Sirait, 2022).

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Badan Pusat Statistik (2023b), pertumbuhan ekonomi ialah proses evolusi berkelanjutan dari keadaan perekonomian sebuah negara berada disituasi sangat menguntungkan dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, Siswadi et al. (2015), menunjukkan bagaimana nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dipergunakan dalam memperkirakan pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan daerah terkait erat dengan pembangunan wilayah, akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hidayah et al., 2023).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan diterima oleh suatu daerah melalui sumber-sumber seperti pajak lokal, biaya pelayanan, pengelolaan aset daerah yang terpisah, serta pendapatan lain yang legal sesuai dengan hukum yang berlaku. Firdausy (2017) menjelaskan PAD merupakan dana yang dikumpulkan melalui sumber daya daerah; Semakin banyak dana berkontribusi pada pembiayaan daerah, semakin besar kapasitas keuangan daerah dalam melakukan perluasan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana alokasi umum menjadi komponen atas pengeluaran Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang ditujukan untuk mengatasi disparitas keuangan dan kualitas layanan publik di berbagai wilayah. Dana ini, bersumber dari APBN, bertujuan akan mendukung pemerataan keuangan di tiap daerah sebagai komponen dari proses desentralisasi (Faudi, 2016).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana alokasi khusus menjadi komponen atas pengeluaran daerah serta Dana Desa (TKDD) yang ditujukan untuk membiayai inisiatif tertentu yang dianggap penting secara nasional dan mendukung penyediaan layanan publik. Penggunaan dana ini telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. DAK terbagi menjadi dua jenis: DAK Fisik, yang digunakan untuk infrastruktur, dan DAK Non Fisik, yang digunakan untuk program non-infrastruktur. DAK ini tidak berbeda dengan DAU serta DBH juga termasuk dalam TKDD.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Federalisme fiskal mengemukakan desentralisasi keuangan merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk memeriksa dan memanfaatkan sumber daya keuangan lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk untuk belanja modal yang tidak hanya mencakup operasional sehari-hari tetapi juga investasi dalam infrastruktur publik. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan dapat memacu peningkatan dalam belanja modal, yang pada gilirannya akan menyediakan layanan publik yang lebih baik dan fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Anggaran untuk belanja modal ini dialokasikan setiap tahun dalam APBD. (Alpi & Sirait, 2022). Selain itu, desentralisasi fiskal yang efektif dan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi akan memperluas otonomi daerah (Ayem & Pratama, 2018).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Sari & Hermanto (2018), Ayem & Pratama (2018) dan Twinki & Widiyanti (2023), menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan analisis tersebut, dugaan dihipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk menyampaikan otonomi untuk daerah dalam mengelola keuangannya, termasuk melalui PAD. Pemerintah daerah diperlukan mampu memanfaatkan PAD dalam membiayai pembangunan, yang tercermin dalam alokasi belanja modal (Halim, 2017). Teori agensi menjelaskan bahwa ada kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menggunakan PAD untuk memperbaiki layanan publik

dan infrastruktur. Diantisipasi bahwa kenaikan PAD dapat mengakibatkan belanja modal menjadi lebih meningkat, yang secara nyata akan meningkatkan layanan publik (Nuarisa, 2013).

Berdasarkan penelitian Marsyaf & Anasta (2019), Sari & Hermanto (2018) dan Syukri & Hinaya (2019) menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan analisis diajukan hipotesis berikut.

H₂: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Teori agensi menjelaskan bahwa dana alokasi umum bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan belanja modal yang mendukung penyediaan layanan publik, memainkan peran penting mengenai keterkaitan antara pemerintah bertindak selaku prinsipal serta masyarakat menjadi agen. DAU, akan dibagikan oleh pemerintah pusat ke daerah, dengan maksud agar mencukupi kepentingan yang beragam di setiap daerah. Dana ini, yang digunakan terutama untuk infrastruktur, berpotensi meningkatkan kualitas layanan publik (Widiasmara, 2019). DAU suatu daerah berkorelasi langsung dengan jumlah belanja modal dialokasikan pemerintah daerah (Hermawan et al., 2021).

Berdasarkan penelitian dari Sulistyaningsih & Haryanto (2019), Heliyanto & Handayani (2016) dan Alpi (2022) menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus yang diperoleh dari pemerintah pusat, ditujukan atas proyek-proyek spesifik akan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang. Penggunaan DAK ini diantisipasi akan meningkatkan standar pelayanan publik melalui investasi modal (Heliyanto & Handayani, 2016). Jika jumlah DAK yang diberikan meningkat, maka pemerintah daerah cenderung meningkatkan alokasi untuk belanja modal. Sebaliknya, Jumlah yang diperuntukkan belanja modal sendiri tentu turun jika DAK menurun. (Hermawan et al., 2021).

Berdasarkan penelitian Marsyaf & Anasta (2019), Lestari & Basuki (2024) dan Alpi (2022) diperoleh bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, hipotesis diajukan adalah:

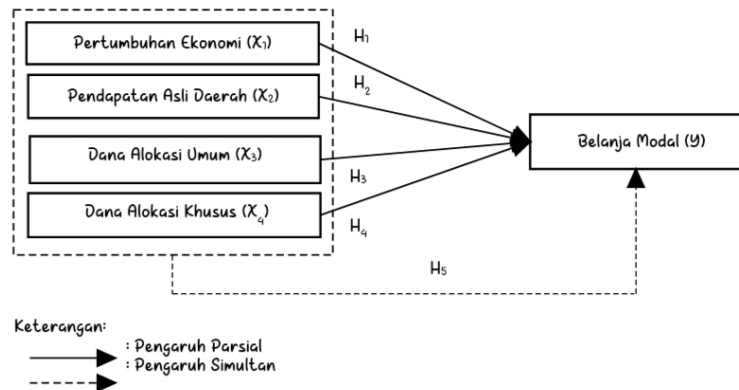
H₄: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Melalui desentralisasi fiskal mendorong pemerintah daerah akan memaksimalkan sumber penerimaan daerah guna mendanai pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik (Anwar, Amalia, et al., 2023). Perkembangan tersebut difasilitasi oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat untuk daerah, yang dapat menaikkan PAD. Belanja modal pembiayaan prasarana dan sarana umum dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan berpotensi berdampak pada PAD. Prioritas pembangunan ditetapkan oleh DAK dalam APBD. Dana ini didanai melalui PAD dan transfer dana perimbangan oleh pemerintah pusat, dimana meliputi DAU, DAK, dan DBH. Dana perimbangan berfungsi sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan daerah dari APBN untuk meningkatkan otonomi daerah akan memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut karena fluktuasi dalam DAK, DAU, dan PAD dapat berdampak langsung mempengaruhi tingkat belanja modal.

Berdasarkan penelitian dilakukan Ayem & Pratama (2018), Syukri & Hinaya (2019) dan Alpi (2022) menunjukkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H₅: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal



Gambar 3. Model Penelitian

3. Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode deskriptif kuantitatif. Sumber pengumpulan data dari situs resmi Badan Pengawas Keuangan (BPK) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Populasi yang digunakan meliputi seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat, yaitu 18 kabupaten dan 9 kota, totalnya berjumlah 27 pemerintah daerah.

Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini Belanja Modal sebagai variabel terikat dalam mencangkup dana yang dialokasikan untuk di akuisisi atau penambahan aset jangka panjang yang memberikan keuntungan melebihi satu siklus akuntansi dengan satuan rasio. Sedangkan, variabel bebas meliputi: (1) Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan output perkapita selama jangka waktu tertentu dihitung melalui PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan satuan rasio. (2) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan diperoleh melalui daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan dengan satuan rasio. (3) Dana Alokasi Umum merupakan dana bertujuan dalam menyeimbangkan finansial setiap daerah serta menjadi sumber pembiayaan regional dengan satuan rasio. (4) Dana Alokasi Khusus adalah komponen atas APBN didistribusikan dalam mendukung aktivitas untuk kepentingan regional dengan satuan rasio.

Metode Analisis Data

Penelitian ini memfokuskan pada data berkaitan dengan variabel independen mencangkup Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Serta variabel dependen yaitu Belanja Modal. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode sampling jenuh. Model yang digunakan yaitu regresi data panel, komposisi atas data *time series* serta data *cross section* (Gujarati & Porter, 2018). Model regresi pada analisis data panel adalah sebagai berikut:

$$\text{LnBMit} = \alpha + \beta_1 \text{LnPEit} + \beta_2 \text{LnPADit} + \beta_3 \text{LnDAUit} + \beta_4 \text{LnDAKit} + \epsilon_{it}$$

BM (Y) = Belanja Modal

α = Konstanta

$\beta_{(1,2,3,4,5)}$ = Koefisien Regresi

Ln = Logaritma natural

PE (X₁) = Pertumbuhan Ekonomi

PAD (X₂) = Pendapatan Asli Daerah

DAU (X₃) = Dana Alokasi Umum

DAK (X₄) = Dana Alokasi Khusus

ϵ_{it} = *Error term*, Kabupaten/Kota dan Rentang waktu penelitian

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

	PE	PAD	DAU	DAK	BM
Maximum	18.26776	28.95595	28.89640	27.96260	28.16246
Minimum	16.38995	25.33586	26.56858	24.74024	24.77370
Mean	17.03382	27.11795	27.66879	26.56636	26.79246
Std. Dev	0.51376	0.83343	0.44184	0.64519	0.66307
Observations	135	135	135	135	135

Sumber: Hasil Output data Eviews 12, 2024

Berdasarkan variabel belanja modal hasil analisis statistik deskriptif menggambarkan nilai maksimum di Kabupaten Bogor tahun 2021 sebesar 28.16246, nilai minimum di Kabupaten Banjar tahun 2020 sebesar 24.77370, nilai rata-rata hitung (mean) Provinsi Jawa Barat 26.79246 dan tingkat rata-rata penyimpangan (*std deviation*) 0.66307. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai maksimum di Kota Bandung tahun 2022 sebesar 18.26776, nilai minimum di Kabupaten Cirebon tahun 2021 sebesar 16.38995, nilai rata-rata hitung (mean) Provinsi Jawa Barat sebesar 17.03382 dengan nilai rata-rata penyimpangan (*std deviation*) sebesar 0.513756. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai maksimum di Kota Bogor tahun 2021 sebesar 28.95595, nilai minimum di Kota Banjar tahun 2019 sebesar 25.33586, nilai rata-rata hitung (mean) Provinsi Jawa Barat 27.11795 dan tingkat rata-rata penyimpangan (*std deviation*) 0.833431. Variabel dana alokasi umum memiliki nilai maksimum di Kabupaten Bandung tahun 2019 sebesar 28.89640, nilai minimum di Kota Banjar tahun 2022 sebesar 26.56858, nilai rata-rata hitung (mean) Provinsi Jawa Barat 27.66879 dengan nilai rata-rata penyimpangan (*std deviation*) sebesar 0.441842. dan Variabel dana alokasi khusus memiliki nilai maksimum di Kabupaten Bogor tahun 2022 sebesar 27.96260, nilai minimum di Kota Banjar tahun 2018 sebesar 24.74024, nilai rata-rata hitung (mean) Provinsi Jawa Barat sebesar 26.56636 serta nilai rata-rata penyimpangan (*std deviation*) sebesar 0.645190.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Hasil dan Keterangan
Normalitas	Probability 0.514314, disimpulkan data berdistribusi normal
Autokolerasi	Durbin-Watson Stat 1.952384, dimana $1.7774(dU) < 1.952384(DW) < 2.2226(4-dU)$, artinya tidak terjadi gejala autokorelasi
Multikolinearitas	Nilai Correlation PE dan DAK sebesar 0.067, sedangkan Correlation PAD dan DAU sebesar 0.557, dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Prob. Chi-Square(1) 0.2359, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Output data Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji asumsi klasik yang menunjukkan data pada penelitian ini tidak mengalami masalah terkait asumsi-asumsi tersebut.

Hasil Identifikasi Model

Tabel 3. Hasil Identifikasi Model Regresi Data Panel

Uji	P-Value	Hipotesis dan Hasil
Uji Chow	0.0000	Terpilih model FEM
Uji Hausman	0.0000	Terpilih model FEM
Kesimpulan	Identifikasi model terbaik pada penelitian ini adalah <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	

Sumber: Hasil Output data Eviews 12, 2024

Hasil uji identifikasi model yang dilakukan untuk memilih antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model dan Random Effect Model (REM) menunjukkan Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang sesuai digunakan pada penelitian ini.

Hasil Uji Regresi Data Panel dan Uji Statistik T

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Data Panel dan Uji Statistik T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-95.42355	21.05317	-4.532504	0.0000
PE	1.214860	0.536049	2.266323	0.0255
PAD	0.132974	0.200245	0.664059	0.5081
DAU	3.545773	0.591882	5.990673	0.0000
DAK	-0.007187	0.082736	-0.086862	0.9309

Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi mengidentifikasi bahwa nilai probabilitas t menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Model penelitian yang dihasilkan dari regresi data panel, sebagai berikut:

$$\text{LnBMit} = -95.42355 + 1.214860\text{LnPEit} + 0.132974\text{LnPADit} + 3.545773\text{LnDAUit} - 0.007187\text{LnDAKit}$$

Interpretasi nilai konstanta negatif dalam model regresi menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak berubah, maka belanja modal akan berpengaruh sebesar -95.42355. Untuk setiap kenaikan 1% dalam pertumbuhan ekonomi, belanja modal diperkirakan akan naik sekitar 1.214860. Peningkatan 1% pada pendapatan asli daerah diperkirakan dapat meningkatkan belanja modal sebesar 0.132974%. Sementara itu, peningkatan 1% dana alokasi umum dapat meningkatkan belanja modal sebesar 3.545773%. Namun, kenaikan 1% dana alokasi khusus diperkirakan dapat mengurangi belanja modal sebesar -0.007187%.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5. Hasil Uji F dan R-Squared (R²)

Uji	Hasil dan Pembahasan
Uji F	Nilai Prob(F-statistic) menunjukkan 0.000000, sehingga secara keseluruhan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
R-Squared (R²)	Nilai R ² sebesar 0.823949 atau 82,39%, mengindikasikan bahwa keempat variabel tersebut secara bersama-sama dapat menjelaskan sekitar 82,39% dari variabel Belanja Modal, serta 17,61% sisanya dijelaskan oleh faktor selain model penelitian

Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai probabilitas F menunjukkan signifikansi keseluruhan variabel. Nilai R² tercatat sebesar 0.823949 atau 82,39%, menandakan bahwa variabel independen secara bersama memberikan kontribusi penjelasan sebesar 82,39% yang terdapat pada variabel dependen.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi dari pertumbuhan ekonomi adalah 0,255 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05, mengindikasikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat, yang berarti hipotesis pertama (H₁) diterima. Ini menunjukkan peningkatan setiap tahun dalam pertumbuhan ekonomi cenderung

diikuti oleh peningkatan dalam belanja modal, yang sering kali mencerminkan perbaikan infrastruktur (Nurzen & Riharjo, 2016). Pertumbuhan ekonomi yang positif biasanya meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai sumber seperti pajak dan retribusi. Mendukung teori federalisme fiskal yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Penelitian ini konsisten dengan temuan dari Sari & Hermanto (2018), Ayem & Pratama (2018) dan Twinki & Widiyanti (2023). Ketiga penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi dapat memicu peningkatan alokasi anggaran belanja modal. Namun, berbeda dari hasil yang ditemukan Syukri & Hinaya (2019), Alpi (2022) serta Lestari & Basuki (2024). Ketiga penelitian tersebut menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. mengindikasikan meskipun belanja modal mungkin meningkat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berarti peningkatan yang proporsional dalam belanja modal, karena hubungan antara keduanya tidak selalu linear dan akan mempengaruhi berbagai faktor lain yang lebih kompleks.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis mengindikasikan nilai signifikansi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0,4081 ($p > 0,05$), artinya tidak ada pengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat, maka hipotesis kedua (H_2) ditolak. Artinya, fluktuasi pada pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi belanja modal. Berdasarkan teori keagenan, kapasitas pemerintah daerah untuk menyalurkan belanja modal bersumber dari PAD dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan menyediakan layanan publik menunjukkan keterkaitan dari masyarakat sebagai agen serta pemerintah sebagai prinsipal pada konteks PAD.

Hasil temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya Marsyaf & Anasta (2019), Sari & Hermanto (2018) dan Syukri & Hinaya (2019). Ketiga penelitian tersebut menunjukkan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Ini mengindikasikan bertambahnya penerimaan daerah yang diterima, maka akan menaikkan juga belanja modal yang dilakukan. Tetapi penelitian ini sejalan dengan Alpi (2022), Noviarti & Rahayu (2021) dan Lestari & Basuki (2024). Ketiga penelitian tersebut menunjukkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan faktor-faktor seperti alokasi anggaran untuk kebutuhan lain, efisiensi pengeluaran, keterbatasan pendanaan lain prioritas pembangunan dan dampak jangka panjang investasi modal membuat ikatan PAD serta belanja modal tidak selalu signifikan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi 0,0000 ($p < 0,05$), yang berarti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima. Ini menandakan bahwa peningkatan dalam DAU yang disampainkan pemerintah pusat cenderung menaikkan belanja modal di daerah tersebut. Temuan ini mendukung teori agensi menjelaskan keterkaitan pemerintah pusat (prinsipal) serta pemerintah daerah (agen) untuk pengelolaan dana perimbangan, dengan otoritas yang diperoleh pemerintah daerah dalam menangani keuangannya secara mandiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sulistyarningsih & Haryanto (2019), Heliyanto & Handayani (2016) dan Alpi (2022). Ketiga penelitian tersebut menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Disebabkan peningkatan pendapatan DAU dalam APBD akan berkontribusi pada peningkatan belanja modal. Akan tetapi, temuan ini berbeda dengan penelitian Ayem & Pratama (2018), Syukri & Hinaya (2019) dan Noviarti & Rahayu (2021), yang menyatakan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dalam kasus ini, sebagian DAU digunakan untuk belanja pegawai, seperti gaji, yang dapat mengurangi dana yang

tersedia untuk belanja modal. DAU sebagai *block grant* memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengalokasikan dana sesuai dengan prioritasnya, akan tetapi jumlah yang diberikan akan kurang dalam memberikan pengaruh yang signifikan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis mengindikasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikansi 0,9309 ($p > 0,05$), artinya tidak ada berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat, sehingga hipotesis keempat (H_4) ditolak. Ini mengindikasikan bahwa perubahan dalam DAK secara implisit tidak menaikkan belanja modal. Temuan ini konsisten dengan teori agensi menjelaskan keterkaitan dari pemerintah pusat (prinsipal) serta pemerintah daerah (agen) untuk pengelolaan dana perimbangan, di mana pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur keuangannya. Namun, terkadang tindakan pemerintah daerah mungkin tidak selaras dengan harapan masyarakat, yang dapat mempengaruhi penilaian kinerja pemerintah daerah.

Hasil temuan ini berbeda dengan penelitian Marsyaf & Anasta (2019), Lestari & Basuki (2024) dan Alpi (2022). ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa tingginya jumlah dana alokasi khusus akan menaikkan belanja modal. Namun, hasil ini sejalan dengan penelitian Syukri & Hinaya (2019), Heliyanto & Handayani (2016) dan Twinki & Widiyanti (2023), menunjukkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Perbedaan tersebut mungkin dipengaruhi oleh variasi dalam sampel serta jangka waktu yang digunakan.

Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengindikasikan bahwa nilai signifikansi untuk variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus adalah 0,0000 ($p < 0,05$), yang menunjukkan secara bersama-sama variabel-variabel ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat. Ini berarti setiap perubahan, baik peningkatan maupun penurunan, pada variabel-variabel tersebut akan mempengaruhi belanja modal. Keandalan temuan ini diperkuat oleh nilai adjusted R-square 0.823949 atau 82,39%, dimana memperlihatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dapat menjelaskan sekitar 82,39% dari variasi dalam belanja modal, sementara sisanya 17,61% dijelaskan variabel diluar model penelitian.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan Alpi (2022). Ayem & Pratama (2018) dan Syukri & Hinaya (2019) yang semuanya menemukan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Ini mengindikasikan bahwa fluktuasi dalam variabel independen secara kolektif akan berdampak pada tingkat belanja modal.

5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian ini masih terbatas diharapkan dapat menyempurnakan model penelitian seperti penambahan teori-teori tambahan dan variabel baru seperti Dana Bagi Hasil, Indeks Harga Konsumen, dan Inflasi. Untuk lebih memahami tren yang mempengaruhi belanja modal, disarankan juga untuk memperpanjang jangka waktu penelitian hingga lebih dari lima tahun. Selain itu, dianjurkan untuk menerapkan metodologi penelitian yang beragam dan memperluas cakupan objek penelitian.

6. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dimana peningkatan ekonomi cenderung menaikkan pengeluaran modal pemerintah. Pendapatan asli daerah tidak

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang mungkin diakibatkan dari ketergantungan akan penerimaan dari pemerintah pusat, yang membatasi otonomi keuangan daerah. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, menandakan bahwa penerimaan dari pemerintah pusat telah digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan, Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, kemungkinan adanya kontribusi relatif kecil dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Secara keseluruhan, Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan belanja modal di Jawa Barat.

Daftar Pustaka

- Adyatama, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Stikubank*, 4(2), 190–205.
- Alpi, M. F. (2022). The Effect Of Economic Growth, Local Revenue, General Allocation Funds And Special Allocation Funds On Capital Expenditures In Regencies/Cities In The Province of North Sumatra. *Prosiding Seminar Internasional Kajian Islam*, 3(1), 1263–1274.
- Alpi, M. F., & Sirait, R. F. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 400–404. <https://doi.org/10.29040/JAP.V23I1.5557>
- Anwar, S., Amalia, H. Z., & Melani, F. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Dan Beban Pada Perusahaan E-Commerce. *Jurnal Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi* 2(2): 199-213., 2, 380–393. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i2.8358>
- Anwar, S., Lasmanal, A., Gunawan, R., Fadhil, M., Zulfikar, K. D., Nurjihan, T. K., Aryadisti, S., & Maula, A. (2023). Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan UMKM Pala Pada Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 3(5), 228–232. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v3i5.629>
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987>
- Aziz, A., Anwar, S., & Setiawan, A. (2023). Determinant Analysis Corporate Governance and Csr To Financial. *Jurnal Akunida*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.30997/jakd.v9i1.7777>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1237/sdgs_10/3
- Faudi. (2016). *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintah Aceh*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2018). *Dasar - dasar Ekonometrika* (5th ed). Salemba Empat.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heliyanto, F., & Handayani, N. (2016). PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN DBH TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(3), 44–51. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1646>
- Hermawan, P. Y., Tiawon, H., & Neneng, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*, 2(3), 242–248. <https://doi.org/10.37304/JEM.V2I3.4384>

- Hidayah, M., Hambani, S., & Aziz, A. (2023). Analisis Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bogor. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(5), 332–344. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i5.1136>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*. 77–132. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Lestari, R. I., & Basuki, P. (2024). The Effect of Economic Growth, Local Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Profit Sharing Fund on Capital Expenditure of The NTB Provincial Government. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS*, 7(1), 62–70. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i01-10>
- Mahmudi. (2009). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mariani, N. A., Kusuma, I. C., & Hambani, S. (2023). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1648–1660. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.326>
- Marsyaf, & Anasta, L. (2019). The Effect Of Regional Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) And Area Of Areans On Capital (Case Study in Regency/City on Java Island in 2016). *European Journal of Business and Management*, 11(16), 121–131. <https://doi.org/10.7176/EJBM/11-16-14>
- Noviarti, H., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pegalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 - 2020). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 2355–9357. <https://openlibrarypublications.telkom.ac.id/index.php/manajemen/article/view/16494>
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 89–95. <https://doi.org/10.15294/AAJ.V2i1.1163>
- Nurbaeti, E., Hambani, S., Jamaludin Aziz, A., & Anwar, S. (2023). Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal : Kajian Pada Efektivitas Pengelolaan Piutang. *Jurnal Akunida*, 9(2), 128–136. <https://doi.org/10.30997/jakd.v9i2.10329>
- Nurzen, M., & Riharjo, I. B. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(4). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1720>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. (n.d.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2022*. (n.d.).
- Sari, I. N., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(12), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/230>
- Setiawan, A. B., Kusuma, I. C., Hambani, S., & Agustin, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Aparatur Desa. *Jurnal Akunida*, 8(1), 76–85. <https://doi.org/10.30997/jakd.v8i1.5774>
- Siswadi, Pituringsih, E., & Irwan, M. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 5(2), 281–298.
- Sulistyaningsih, I., & Haryanto, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).

- Sutisna, D., Nirwansyah, M., Ningrum, S., & Anwar, S. (2024). Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi pada Konteks Berbagai Isu di Bidang Akuntansi. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4802–4821. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12973>
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal Of Economic, Management And Accounting*, 2(2), 30. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>
- Twinki, B. S., & Widiyanti, D. W. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Barat. *Journal of Development Economic and Social Studies. Universitas Brawijaya*, 2(3), 489–504. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.03>
- Undang-Undang No. 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.* (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2006.* (n.d.).
- Wahyuningsih, A., Afif, M., & Hambani, S. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(5), 59–75. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i5.1089>
- Waryanto, P. (2017). No Title Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>
- Wasylenko, M. (1987). Fiscal Decentralization and Economic Development. *Public Budgeting & Finance*, 7(4), 57–71. <https://doi.org/10.1111/1540-5850.00764>
- Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset Dan Luas Wilayah, Terhadap Belanja Modal Economic Growth Sebagai Variabel Moderating Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2016. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 2(1), 45–56. <https://doi.org/10.22515/jifa.v2i1.1594>